

# **DEMOKRASI DAN KESEJAHTERAAN** **(Democracy and Welfare)**

**Agus Budi Purwanto**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Email: aguspurwanto5919@yahoo.com  
Dan

**Mochamad Syawie**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Email: msyawie@yahoo.com

## **Abstrak**

*Teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomis suatu Negara sangat mempengaruhi kepolitikannya terdiri dari dua versi yang berbeda. Pertama, adalah hipotesis rezim (regime hypothesis) yang berpendapat bahwa kestabilan institusi-institusi demokrasi di suatu negara dipengaruhi atau dikondisikan oleh tingkat kelimpahannya. Rezim demokrasi hanya bertahan di negara-negara kaya, sehingga GDP per kapita, menurut hipotesis ini, menentukan kelanggengan demokrasi. Kedua adalah hipotesis kebijakan (policy hypothesis) yang menegaskan profil kebijakan publik dari suatu negara ditentukan oleh tingkat kekayaannya. Jadi, apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan itu hanya akan muncul di negara-negara yang perekonomiannya sudah mapan dan makmur, jadi di sini GDP per kapita dianggap menentukan kualitas maupun konfigurasi kebijakan suatu negara. Studi tentang sistem-sistem politik atau negara-negara demokrasi merupakan bagian dari bidang studi ilmu politik komparatif (comparative politics) yang semakin diminati sejak dekade ini.*

**Kata kunci:** demokrasi, kesejahteraan

## **Abstract**

*The theory that economic factors affect a country political consists of two different versions. First, the hypothesis of regime (regime hypothesis) who argued that the stability of democratic institutions in a country affected or conditioned by the level of abundance. Democratic regimes survive only in rich countries, so that GDP per capita, according to this hypothesis, determine the continuity of democracy. The second is a hypothetical policy (policy hypothesis) that define the profile of publik policy of a country is determined by the level of wealth. So, that so-called welfare state will only appear in countries whose economies are already well established and prosperous, so here's GDP per capita is considered to determine the quality and configuration of a country's policies. The study of political systems or democratic countries are part of the field of comparative studies of political science (comparative politics) are increasingly in demand since the decade.*

**Keywords:** democratic, welfare

## **PENDAHULUAN**

Mengaitkan demokrasi dengan kesejahteraan tidak pernah putus dari beragam perdebatan. Persoalannya, apakah demokrasi menjadi faktor pemicu kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya justru kesejahteraanlah yang

memampukan demokrasi berjalan dengan baik? Misalnya, apakah benar demokrasi menjadi satu-satunya prasyarat bakal terciptanya kesejahteraan, atau sebaliknya kesejahteraan menjadi syarat penentu?

Masih banyak lagi yang dapat diperdebatkan dari keduanya. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan “mana yang lebih dahulu” di antara variabel demokrasi dan kesejahteraan belakangan ini menjadi semakin krusial dipersoalkan, terutama bagi negara-negara yang pada satu sisi kini berubah struktur politiknya, sementara di sisi lain negara tersebut tengah pula bergulat dalam pemakmuran masyarakatnya (baca: Bestian Nainggolan, 2011).

Mengutip gagasan Kevin Olson (2006) dalam karyanya, *Reflexive democracy: Political Equality and the Welfare State*, pemikiran politik kontemporer mengalami krisis ketika dimensi kesejahteraan absen dalam pembicaraan demokrasi. Ia menguraikan, untuk mengintegrasikan kesejahteraan dalam pembicaraan demokrasi maka pertama-tama penting kiranya menggeser cara pandang kita tentang kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat bukanlah istilah yang secara sempit dimaknai dalam konteks sosial-ekonomi, melainkan lebih luas lagi di dalam dimensi politiknya pula (Olson, dalam Airlangga Pribadi, 2011).

Bagi Indonesia, pertanyaan semacam tersebut di atas menjadi semakin relevan, terutama tatkala kedua persoalan itu dihadapkan pada realitas yang berkembang di masyarakat saat ini. Mencermati berbagai hasil pengumpulan opini publik yang dilakukan (Kompas, 19/12/2011, h.5) sepanjang tahun ini, misalnya, terlihat benar adanya kecenderungan ketidakpuasan publik yang cukup terhadap berbagai kondisi politik, sosial, ataupun ekonomi yang mereka rasakan. Sebagian besar di antara mereka berpandangan bahwa reformasi politik yang 12 tahun terakhir mampu melembagakan demokrasi di negeri ini sayangnya dianggap belum juga mampu menjawab harapan mereka. Kinerja sejumlah institusi politik demokratik, baik partai politik, DPR, maupun pemerintahan, yang hadir selama kurun waktu tersebut, dinilai tidak memuaskan. Semakin mengecewakan tatkala kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari perubahan struktur politik tidak juga banyak dirasakan sebagaimana yang mereka harapkan.

Terdapat indikasi bahwa hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan mulai dapat terbaca. Hasil pengujian kuantitatif terhadap kedua variabel tersebut menunjukkan kecenderungan adanya korelasi positif yang cukup signifikan. Artinya, keduanya dapat dipersandingkan dan saling terkait satu sama lain. Dalam hal ini, semakin tinggi indeks demokrasi suatu wilayah, ada kecenderungan semakin tinggi pula indeks kesejahteraan atau kemakmurannya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi indeks kesejahteraan suatu wilayah, kecenderungan indeks demokrasinya juga semakin tinggi (Nainggolan, 2011). Selain itu, pola hubungan yang terbentuk menunjukkan pula kausalitas di antara keduanya. Yang tampak menonjol, kesejahteraan menjadi faktor determinan yang memungkinkan kualitas demokrasi yang terbentuk. Hanya, model kausalitas demikian tidak serta-merta menjadi suatu pijakan yang akurat lantaran terindikasi pula faktor-faktor lain yang seharusnya hadir dalam pembentukan kualitas demokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perihal Kesejahteraan Perspektif Politik

Dalam kajian ini, indeks demokrasi yang dimaksud mengacu pada pada hasil rumusan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP). Setelah tidak kurang tiga tahun bereksperimen dalam peramuan indikator ini, tahun 2011 lembaga tersebut mempublikasikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini dihasilkan dari berbagai indikator pengukuran aspek kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan kelembagaan politik pada 33 provinsi Indonesia. Hasilnya, skor nasional IDI mencapai 67,3 (lihat Nainggolan, 2011). Dengan skor sebesar itu, tergolong tinggikah kualitas demokrasi demokrasi di negeri ini? Masih serba relatif. Jika mengacu pada skor tertinggi indeks sebesar 100, yang kurang lebih menjadi acuan situasi demokrasi yang sempurna, perolehan nilai indeks nasional

yang sebesar itu tergolong tidak buruk. Namun, skor sebesar itu tidak juga tersimpulkan tinggi. Sebenarnya, cukup banyak gugatan yang dapat dialamatkan kepada sistem pengukuran indeks semacam ini. Akan tetapi, tidak dapat diingkari, sejauh ini indeks politik demikian cukup layak digunakan dalam memenuhi kebutuhan analisis.

Berbeda dengan IDI, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti kinerja pembangunan suatu kawasan yang didasarkan pada tiga dimensi dasar. Ketiganya merupakan kapasitas dasar penduduk, yaitu berupa besar umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan manusia yang layak. Dalam perhitungannya, masing-masing dimensi tersebut diturunkan dalam berbagai indikator, seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah, dan kemampuan daya beli. Berbagai indikator tersebut, sekalipun tidak sepenuhnya identik dengan segenap aspek kesejahteraan manusia, cukup memadai dijadikan rujukan.

Berdasarkan pengukuran tahun 2009, skor IPM Indonesia sebesar 71,76. Dengan mengaitkan kedua indeks IDI dan IPM inilah, relasi antara demokrasi dan kesejahteraan terbentuk. Di sisi lain, berdasarkan pola hubungan yang terbentuk, dapat pula dipetakan antara demokrasi dan kesejahteraan pada setiap provinsi di negeri ini. Masih banyak celah guggatan memang. Namun, pengelompokan semacam ini sedikit banyak dapat mengungkap konfigurasi masing-masing provinsi dalam kehidupan demokrasi ataupun kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam kaitan ini, terdapat suatu teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi kepolitikannya. Terdapat dua versi yang berbeda, pertama, adalah hipotesis rezim (*regime hypothesis*) yang berpendapat bahwa kestabilan institusi-institusi demokrasi di suatu negara dipengaruhi atau dikondisikan oleh tingkat kelimpahannya. Rezim demokrasi hanya bertahan di negara-negara kaya, sehingga GDP per kapita, menurut hipotesis

ini, menentukan kelanggengan demokrasi. Yang kedua adalah hipotesis kebijakan (*policy hypothesis*) yang menegaskan profil kebijakan publik dari suatu negara ditentukan oleh tingkat kekayaannya. Jadi, apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan itu hanya akan muncul di negara-negara yang perekonomiannya sudah mapan dan makmur, jadi di sini GDP per kapita dianggap menentukan kualitas maupun konfigurasi kebijakan suatu negara (baca: Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, 1994).

Tidak heran dalam situasi semacam ini, bibit-bibit frustrasi sosial merekah. Terdapat kalangan yang memandang ketika kesejahteraan yang diekspektasikan tidak juga kunjung dirasakan, jalan demokrasi yang sebelumnya telah dipilih diragukan manfaatnya. Bahkan, diantaranya tampak ada kesan, adanya kerinduan mereka pada masa ‘kegemilangan’ Orde baru. Terdapat pula sebagian kalangan lainnya yang mulai merasakan bahwa kesejahteraan yang sepatutnya terlebih dahulu dicapai. Dalam kondisi sejahtera, mewujudkan demokrasi tidak lagi menjadi masalah.

### Perihal Demokrasi

Manusia ada pada sifatnya yang terbaik apabila: tidak ada di antara kita yang miskin, tetapi juga tidak ada yang ingin menjadi menjadi lebih kaya. Juga tidak ada alasan merasa takut akan terdesak karena yang lainnya ingin maju ....” Ungkapan ini disampaikan John Stuart Mill (1806-1873) dalam *Principles of Political Economy*, sebagaimana dikutip Toeti Prahasthita (2011). Dia juga mengakui tidak pernah tertarik pada kehidupan ideal yang dicanangkan oleh mereka yang mengira bahwa wajar kalau kita berjuang keras untuk maju, dan bahwa saling menindas, saling menghancurkan, saling menyikot dan saling menginjak yang mencirikan perilaku masyarakat sekarang - memang takdir yang kita kehendaki. Mereka rupanya tidak menganggap gejala-gejala itu sebagai salah satu tahap perkembangan industrialisasi yang menjijikan.

Dengan kecepatan dan derajat yang berbeda, proses industrialisasi menyusup dalam gerak pemabangunan setiap negara di dunia. Persoalannya kemudian, kehadirannya sering menimbulkan masalah sosial-politik yang tidak selalu stabil dan positif (Nurimansjah Hasibuan, 1989). Untuk itu, melihat berbagai pemikiran ekonomi dan kemudian menelaahnya dalam kasus-kasus empiris mungkin bisa membuka mata kita terhadap eksese-eksese yang muncul. Sejarah pembangunan ekonomi telah menunjukkan bukti bahwa dengan berlangsungnya proses industrialisasi, pendapatan perkapita meningkat, dan pada struktur ekonomi terjadi pula pendalaman. Pendapatan yang meningkat menyebabkan komposisi permintaan berubah sehingga secara relatif permintaan terhadap pangan dan sandang cenderung menurun.

Ada dua permasalahan pembangunan utama yang pada saat ini dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kedua masalah itu adalah kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar rakyat negara-negara itu, dan beban hutang luar negeri yang harus mereka tanggung. Untuk mengatasi masalah ini biasanya para perencana pembangunan di negara-negara tersebut menyusun suatu model pembangunan yang disusun atas dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa kemiskinan dan hutang luar negeri itu bisa diatasi dengan cara capital transfer dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Asumsi kedua adalah bahwa kedua masalah itu dapat dipecahkan apabila pemerintah menjadi pengelola tunggal dana-dana pembangunan itu (Loekman Soetrisno, 1988).

Dua asumsi teoritik yang menjadi dasar dari model pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang dapat dikatakan gagal dalam memecahkan dua masalah pokok dalam pembangunan negara-negara itu, yakni kemiskinan dan hutang luar negeri yang membengkak (Loekman Sutrisno 1988). Salah satu sebab kegagalan itu terkait erat dengan kenyataan bahwa model pembangunan yang dikembangkan atas dasar asumsi itu meletakkan

negara dan aparatnya sebagai penanggung jawab tunggal pembangunan dan pengelola tunggal dana serta sumber daya pembangunan yang ada di negara-negara itu (Soetrisno, 1988). Keadaan seperti ini menimbulkan suatu masalah pembangunan baru di negara-negara sedang berkembang, yakni gejala enggan masyarakat untuk aktif berpatisipasi dalam proses pembangunan. Apabila kita kaji rencana pembangunan yang ditulis para perencana pembangunan di negara yang sedang berkembang maka satu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa semua perencana pembangunan itu melihat bahwa industrialisasi adalah dewa penyelamat dari masalah pembangunan yang dihadapi negara-negara itu. Menjadi negara industri dalam artian membangun industri-industri berat seperti halnya yang dibangun negara-negara Barat dianggap sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan yang mereka rencanakan. Sekali lagi suatu ironi yang terjadi dalam sejarah pembangunan di negara sedang berkembang yaitu bahwa ternyata industri yang bermunculan di negara-negara tersebut tidak berhasil memecahkan masalah pemebangunan yang mereka hadapi.

Pengangguran tetap menjadi masalah dan struktur ekonomi negara-negara itu tetap seperti apa yang diwariskan para penguasa kolonial kepada negara-negara itu, yakni struktur ekonomi yang dualistik. Bahkan yang memprihatinkan adalah justru proses industrialisasi yang berlangsung di negara berkembang justru membuat negara-negara tersebut jatuh dalam hutang luar negeri yang membengkak. Utang bagi sejumlah negara, pada saat-saat tertentu, menjadi penolong. Namun, utang bisa berubah menjadi bencana. Jumlah utang negara ini terus menggunung, sudah mencapai Rp 1.768 triliun. Padahal, sepuluh tahun yang lalu, utang negeri ini masih sekitar Rp 1.273 triliun. Itu berarti, tiap tahun jumlah utang negeri ini naik rata-rata sekitar Rp 50 triliun (Media Indonesia, 25/11/2011, h.1, dalam Kolom Editorial "Utang Kian Menggunung"). Bahkan, dalam setahun terakhir tren penambahan utang meningkat. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Kementerian Keuangan menunjukkan pada 2010 jumlah utang pemerintah Rp 1.676 triliun. Artinya, dalam kurun waktu setahun terakhir utang bertambah sebesar Rp 1,19 triliun.

Menurut Aristoteles, dalam *Politics*, sebagaimana dikutip Aditama (2011), “Orang yang baik akan mampu bertahan dalam kemiskinan, kondisi sakit, atau kemalangan-kemalangan lain. Namun, tentu dia hanya akan bahagia kalau keadaan menjadi sebaliknya. Itu yang membuat berilusi bahwa kekayaan lahiriah adalah sumber kebahagiaan” pendapat dua filsuf masa lalu itu membuktikan, masyarakat tidak pernah bebas dari keserakahan orang-orang yang tega mengelabui lingkungannya. Itulah yang sedang kita saksikan, sekalipun slogan-slogan dan genderang demokrasi berbunyi nyaring.

Keruwetan dalam sistem demokrasi kita akhir-akhir ini membuat segolongan orang tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa sistem otoriter Orde Baru (Orba) cenderung lebih berhasil untuk kita. Lalu mereka menyebut tentang kesuksesan Orba dalam meningkatkan GDP per kapita, yang dalam tiga dasawarsa naik dari US\$70 (1968) menjadi sekitar 22 kali lipat pada akhir Orba. Keamanan dalam negeri terjamin. Kesuksesan juga dicapai dalam usaha KB, transmigrasi, swasembada pangan, dan mengurangi jumlah pengangguran. Gerakan wajib belajar berjalan lancar, begitu juga usaha mengembangkan nasionalisme. Padahal, semua orang pada hakikatnya ingin meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Sistem demokrasi dibayangkan bisa menjadi jawabannya. Diasumsikan, masyarakat di negara demokrasi lebih bahagia daripada masyarakat di negara otoriter.

Ada beberapa indeks pengukuran/kriteria yang cukup lazim diterapkan pada beberapa negara demokrasi (Lane dan Ersson, 1994, h.173), berikut indeks-indeks tersebut:1). Indeks Pembangunan Politik karya Cutright. Indeks ini mengukur keberadaan, kebebasan dan fungsi lembaga legislatif serta eksekutif di suatu Negara. 2). Indeks Pembangunan

Politik Demokratis karya Neubauer. Indeks ini mengukur persentase penduduk dewasa yang sudah memiliki hak memilih, tingkat persamaan perwakilan politik, persamaan atau pemerataan perolehan informasi serta persaingan perebutan suara dalam pemilihan umum. 3). Indeks Kinerja Demokrasi karya Jacman. Indeks ini mengukur jumlah penduduk yang memiliki dan menggunakan hak memilih, tingkat persaingan yang terdapat dalam sistem kepartaian (persaingan antar partai politik), keteraturan atau ketidakteraturan dilangsungkannya pemilihan umum, serta tingkat kebebasan media massa. 4). Indeks Demokrasi Politik karya Bollen. Indeks ini mengukur tingkat kebebasan media massa, kebebasan kelompok oposan, berat ringannya sanksi pemerintah, kejujuran proses pemilihan umum, kelancaran proses seleksi eksekutif (pengisian jabatan-jabatan eksekutif), serta kelancaran proses seleksi legislatif. 5) Indeks demokratisasi karya Vanhanen. Ia mengukur tingkat persaingan sistem kepartaian dan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. 6). Indeks Hak Asasi Manusia karya Humana yang khusus mengukur keberadaan dan tingkat pengakuan penguasa terhadap hak asasi manusia warganya secara keseluruhan, dan 7). Indeks kebebasan karya Gastil. Indeks ini mengukur tingkat pengakuan terhadap hak-hak politik, hak-hak sipil, serta sejauh mana kebebasan di suatu Negara terpelihara (Jan-erik Lane dan Svante Ersson, 1994, hal 173-174).

Secara kodrati, demokrasi yang bersendikan kebebasan, persamaan dan persaudaraan harus dibangun berdasarkan nalar dan hati nurani. Dengan hanya kekuatan nalar akan melahirkan sistem demokrasi yang rasional. Noam Chomsky sebagaimana dikutip Wiranto (2011) berpendapat bahwa ideologi pasar bebas yang tak berhati nurani hanya meningkatkan keserakahan korporasi, yang diwujudkan dalam bentuk demokrasi elektoral nominal. Namun perlu diwaspadai pandangan Larry Diamond, yang mengabarkan adanya kecenderungan kontradiktif di satu pihak terjadi pertumbuhan demokrasi elektoral (atau demokrasi formal),

di pihak lain terjadi stagnasi dalam pemenuhan kebebasan dan kesejahteraan warga. Menurut Diamond (dalam Wiranto, 2011), kecenderungan tersebut merupakan petunjuk terjadinya “kedangkalan demokratisasi”. Situasi kontradiktif seperti itu ditunjukkan dengan kian banyak negara yang cenderung gagal memetik keuntungan dari demokrasi electoral. Mereka malah menghasilkan pemerintahan yang-sekalipun punya legitimasi tinggi- tak efisien, korup, tidak akuntabel dan didominasi kepentingan jangka pendek.

Keberhasilan reformasi politik di Indonesia sejak 1998 memang telah diakui dunia. Sistem demokrasi elektoral telah dijalankan melalui pemilihan umum yang kompetitif untuk tujuan memperoleh kekuasaan efektif. Paling tidak Indonesia sudah melakukan pemilu tiga kali, yakni pada tahun 1999, 2004 dan 2009, yang menghasilkan pemerintahan yang cukup *legitimate*. Namun, kenyataannya, Indonesia pun harus mengalami akibat dari demokrasi tanpa hati (cenderung bersifat demokrasi prosedural) itu dengan adanya kontradiksi antara keberhasilan mengembangkan demokrasi politik di satu pihak dan penurunan kesejahteraan di pihak lain.

Berdasarkan data Bank Pembangunan Asia, dalam tiga tahun terakhir jumlah orang miskin di Indonesia meningkat dari 40,4 juta tahun 2008 menjadi 43,1 juta orang tahun 2010, meningkat sekitar 2,7 juta orang (lihat Wiranto, 2011). Ironisnya, saat yang sama juga terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari Rp 23,1 juta tahun 2009 menjadi Rp 27 juta tahun 2010 (BPS, 27 Februari, 2010). Adanya peningkatan jumlah orang miskin di satu sisi dan pendapatan per kapita di sisi lain menunjukkan terjadi ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup mencolok.

Kenyataan ini menunjukkan, demokrasi elektoral tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi elektoral, yang merupakan instrument bagi sistem ekonomi pasar bebas, terbukti hanya memfasilitasi kepentingan korporasi yang bertujuan untuk meraih keuntungan finansial

dan mengakumulasi kapital semata-mata. Dalam pandangan Chomsky, demokrasi elektoral hanya memfasilitasi keserakahan korporasi. Sejalan dengan rasionalisasi ekonomi, demokrasi elektoral yang mengadakan kalkulasi rasional akhirnya berkembang ke arah bentuk politik transaksional. Proses-proses politik akhirnya dikendalikan oleh kapital atau uang. Akibatnya, rakyat hanya jadi obyek transaksi dalam proses demokrasi. Dalam situasi seperti ini, sistem demokrasi berkembang menjadi sistem oligarkis yang hanya dinikmati oleh segelintir elite.

Kapital adalah bagian dari kekayaan demi produksi berjenis-jenis kekayaan lain yang menghasilkan capital lagi dalam siklus tanpa batas uang menghasilkan uang, dan kaum kapitalis mulai beternak uang dan bukan lagi memproduksi barang, *goods*. Sedemikian perkembangan itu sehingga capital tidak lagi bersentuhan langsung dengan produksi nyata, dan dunia kerja. Kapital bekerja dengan dirinya, menjual dirinya, dan menjadi dirinya. Modal menghasilkan modal, dan uang berbunga uang sampai ada campur tangan legalitas dan keadilan (Daniel Dhakidae, 2009).

Intervensi legalitas adalah wewenang negara yang diberikan tugas oleh para warganya. Sedangkan intervensi keadilan adalah ideology. Dua-duanya hidup dan menjadi inti demokrasi, yaitu apa yang disebut oleh Alain Badiou hasrat egaliter, dan ide tentang keadilan. Bangsa ini dalam masa-masa terakhir terombang-ambing di antara ketiga hal di atas- kekayaan, capital dan demokrasi. Hubungan ketiganya harus dicarikan jalan keluar. Tanah yang kaya sudah melegenda, akan tetapi tidak semua kekayaan itu menjadi kapital. Kapital yang tidak terkendalikan hanya berarti ada yang salah dengan demokrasi. Hidup ideal adalah campuran manusiawi antara kekayaan, kapital dan demokrasi.

Keadaan seperti itu menyadarkan kita untuk mengembalikan demokrasi agar tidak mengutamakan akal semata, tetapi harus diimbangi pertimbangan moral dan etika yang bersumber pada hati nurani. Hal ini bukan saja merupakan kewajiban etis yang bersifat

universal, melainkan juga memiliki rujukan normatif dalam UUD 1945.

### **Demokrasi Dan Kesejahteraan**

Kita hidup dalam sebuah pemerintahan dan masyarakat yang penuh paradoks. Pada awalnya demokrasi dirumuskan dan diperjuangkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih melalui mekanisme control yang melekat dan transparan untuk menyejahterakan rakyat. Yang terjadi sebaliknya, demokrasi diselenggarakan melalui korupsi yang menyengsarakan rakyat. Kita masih ingat, suasana batin yang mendorong lahirnya reformasi adalah mengakhiri korupsi dan sentralisme kekuasaan yang menindas. Maka, reformasi pun melahirkan dua agenda utama: demokratisasi dan otonomi daerah setelah mengubah UUD 1945. Maka, kini berita yang dominan adalah gegap gempita sepak terjang partai politik di pusat ataupun daerah dan menguatnya pasar bebas yang dimanfaatkan oleh modal asing (baca: Komaruddin Hidayat, 2012).

Demokrasi berarti kebebasan. Namun, kebebasan tanpa penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih sama halnya menyerahkan panggung reformasi dan demokrasi kepada koruptor yang berlindung di balik jubah parpol dan pada komprador kapitalisme global amat rakus. Berdasarkan konstitusi negara, sebuah pemerintahan dibentuk untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat. Lewat mekanisme demokrasi, berbagai lapisan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, terbentuk melalui pemilihan langsung. Masalahnya adalah para kandidat yang memenangi pemilu dan pilkada itu lebih karena ditopang oleh kekuatan uang, bukan oleh integritas dan kapabilitas. Jadi, panggung demokrasi yang dihasilkan reformasi telah berubah menjadi ajang bisnis kekuasaan sebagai bagian dari paradigma pasar bebas, sebagai antithesis terhadap sentralisasi dan hegemoni negara semasa Orde Baru.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamantkan kepada bangsa Indonesia untuk melembagakan sistem demokrasi sosial atau

sosio-demokrasi. Dalam sistem demokrasi seperti itu, kedaulatan rakyat tidak hanya ditegakkan dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Bung Hatta pernah mengemukakan, "Jika di sebelah demokrasi politik belum terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka" (Revrisond Baswir, 2012).

Amanat melembagakan demokrasi ekonomi dijabarkan melalui ketiga ayat asli dalam Pasal 33 UUD 1945: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, serta 3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, sebagaimana berlangsung sejak 17 Agustus 1945, amanat melembagakan sistem demokrasi sosial itu terus-menerus ditentang pihak colonial dan kaki tangannya. Dalam rangka itu, selama 67 tahun belakangan ini, pihak colonial telah melancarkan berbagai subversi untuk menelikung amanat UUD 1945 itu. Transformasi yang dialami Indonesia dalam 67 tahun sesungguhnya tidak lebih dari transformasi dari kolonialisme menuju neokolonialisme.

Menurut Baswir, sebagaimana berlangsung di sejumlah Negara yang melembagakan sistem demokrasi korporasi, fungsi partai politik di Indonesia cenderung berubah dari penyalur aspirasi rakyat menjadi pembela kapitalisme. Karena Negara diurus para petinggi partai politik, fungsi Negara turut berubah dari memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi memajukan akumulasi capital dan menjongoskan kehidupan bangsa.

Dengan latar seperti itu, mudah dipahami jika berbagai kebijakan ekonomi-politik nasional cenderung bertentangan dengan aspirasi rakyat banyak. Hal itu tidak hanya tampak secara mencolok dalam penyelenggaraan sector strategis, seperti keuangan dan pertambangan,

tetapi mulai menyelinap pula ke sector-sektor yang selama ini menjadi tumpuan hidup rakyat banyak, seperti pertanian dan perdagangan.

Bagaimana masyarakat dan pemerintah Indonesia akan menjawab berbagai masalah sosial yang akan semakin berkembang menyusul ekspansi liberalisasi ekonomi dunia dewasa ini. Apakah sistem kesejahteraan sosial tradisional masih akan dapat berfungsi efektif untuk memecahkan masalah-masalah sosial di dalam konteks ekonomi pasar yang akan semakin marak. Bagaimana sistem kesejahteraan nasional harus menanggapi ketegangan-ketegangan yang akan terjadi semakin keras antara tuntutan sistem kesejahteraan sosial “residual” dan sistem kesejahteraan sosial “institusional” di hadapan persaingan pasar bebas yang akan semakin keras (Nasikun, 1999). Apa implikasi semua itu bagi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan kesejahteraan sosial di masa mendatang. Itulah beberapa pertanyaan sangat mendasar yang akan kita hadapi semakin nyata memasuki era dewasa ini dan yang akan datang. Selanjutnya perlu diberi perhatian juga bagaimana suatu sistem kesejahteraan sosial nasional harus dirumuskan untuk menjawab proses produksi dan reproduksi masalah-masalah sosial yang akan semakin “inheren” di dalam masyarakat di hadapan dinamika ekonomi pasar bebas yang akan semakin keras. Akhirnya diperlukan untuk meletakkan perhatian awal bagi pemahaman tentang dinamika produksi dan reproduksi masalah-masalah sosial di masa mendatang, perumusan “arah dasar” pengembangan kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial menghadapi era liberalisasi ekonomi dunia dewasa ini, dan yang tidak kalah pentingnya, implikasi perumusan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mendukung pengelolaannya.

Pembangunan kesejahteraan sosial mendatang ini sebaiknya memperhitungkan perkembangan bergulirnya globalisasi yang ditandai dengan demokratisasi politik, liberalisasi pasar, dan universalisasi kultural. Demokratisasi politis menghendaki

pembangunan kesejahteraan sosial oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat (Sumarno, 1999). Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu kebutuhan agar supaya terwujud masyarakat yang mandiri, mengerti hak dan kewajibannya secara tepat dan mampu berperan aktif dalam pergaulan nasional dan internasional. Liberalisasi pasar menuntut terjadinya ketahanan sosial dan ekonomi rakyat sehingga tidak tergusur oleh gelombang pasang-pasangnya pasar bebas. Ekonomi kerakyatan tidak hanya sebagai slogan, akan tetapi perlu diaktualisasikan untuk memberdayakan kemampuan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Sementara itu, universalisasi cultural menantang kita untuk tidak kehilangan identitas dan jatidiri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, setiap bantuan yang berdampak ketergantungan dan apalagi hubungan yang opresif harus dihindari oleh karena bantuan yang demikian cenderung melunturkan martabat dan harkat masyarakat.

## KESIMPULAN

Sebuah penelitian memperlihatkan, dalam satu abad terakhir jumlah negara yang memadai disebut demokratis melonjak sepuluh kali lipat menjadi seratus negara (Inoguchi dkk, 1998, dalam Budiarto Danujaya, 2011). Ada kecenderungan bahwa dewasa ini semakin sedikit negara yang masih bertahan dengan sistem totaliter. Setidaknya dalam konteks terbatas, demokrasi telah menjadi semacam jargon peradaban sistem dan perilaku politik, semacam prasyarat untuk legitimasi dalam pergaulan global.

Barangkali yang menggelitik tinggallah mengpa nilai-nilai demokrasi tiba lebih dahulu sebagai keniscayaan sejarah mendahului keadilan dan kesejahteraan bersama yang diusung kebanyakan narasi besar termasuk sosialisme. Barangkali, seperti ditandaskan Amartya Sen, “Keadilan tunadabat boleh jadi sebuah gagasan terpasung”. Kiranya, seturut konteks itulah peraih Nobel mEkonomi 1998 ini dalam berbagai bukunya selalu menekankan kembali ‘pembangunan sebagai kebebasan’.

Demokrasi, dengan kebebasan dan kesetaraannya mendatangkan kapabilitas untuk senantiasa menyempurnakan bahkan merekonstruksi prosedur dan proses pemerintahan dan politik (Danujaya, 2011). Jadi, selain nilai-nilai intrinsiknya demokrasi mempunyai kapasitas informative, deleberatif, protektif, formtif, dan rekonstruktif, termasuk bagi artikulasi maupun praksis keadilan dan kesejahteraan.

Sekarang terbukti, kelemahan-kelemahan dalam sistem sebelumnya terulang lagi. Banyak yang merasa tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam demokrasi. Malahan korupsi semakin merajalela, dilakukan oleh mereka yang mengaku mewakili rakyat. Sejauh ini belum ada lembaga-lembaga survey yang mencoba meneliti seberapa jauh keterlibatan rakyat umum dalam sistem demokrasi yang sedang berjalan ini, serta apa yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan keresahan mereka. Berapa besar keinginan mereka untuk menyempurnakan sistem ini dan bagaimana caranya, mengingat sistem penegakan hukum dan perwakilan rakyat cenderung tidak berjalan sesuai harapan. Pertanyaan-pertanyaan klise yang belum terjawab (Adhitama, 2011). Meminjam ungkapan Chomsky, perimbangan etis dalam kehidupan politik dan ekonomi yang bersumber pada hati nurani akan membentuk sistem demokrasi partisipatif yang cenderung dapat mewujudkan keadilan sosial.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Bestian, N. (2011, 19 Desember). Jajak Pendapat "Kompas" Demokrasi dan Kesejahteraan. *Harian Kompas*.
- Budiarto. D. (2011, 30 Desember). Demokrasi, Keniscayaan Sejarah. *Harian Kompas*.
- Daniel. D. (2009). Mengolah Kekayaan, Kapital dan Demokrasi. *Prisma No. 1, Vol 28*, Juni 2009. LP3ES. Jakarta.

- Jan-Erik, L. dan Svante, E. (1994). *Ekonomi Politik Komparatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Komaruddin, H. (2012, 26 Mei). Korupsi untuk Demokrasi. *Harian Kompas*.
- Loekman, S. (1988), Pembangunan ekonomi dan Demokratisasi Ekonomi: Satu Perspektif Sosiologis. *Prisma, No. 6. LP3ES*. Jakarta
- Nasikun. (1999). *Menuju Suatu Sistem Kesejahteraan Sosial Institusional Melalui Pengembangan SDM Pekerja Sosial*. Makalah pada Rapat Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial BDPTS. Departemen Sosial. Yogyakarta.
- Nurimansjah, H. (1989). Pemerataan, Pertumbuhan dan Konsentrasi Ekonomi dalam Proses Industrialisasi. *Prisma No.9. LP3ES*. Jakarta
- Revrison, B. (2012, 21 Mei). Demokrasi Terjajah. *Harian Kompas*.
- Sumarno. (1999). *Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Makalah Seminar. B2P3KS. Yogyakarta.
- Toeti, P.A. (2011, 23 Desember). Sumber Kebahagiaan dalam Demokrasi. *Media Indonesia*.
- Wiranto. (2011, 29 Desember). Demokrasi Yang Kehilangan Hati. *Harian Kompas*.